

Perkembangan **PEMBANGUNAN** **PROVINSI SUMATERA BARAT** **2015-2020**



Perkembangan **PEMBANGUNAN** PROVINSI SUMATERA BARAT 2015-2020



Perkembangan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 2015-2020

ISBN : 978-602-6544-75-9
No. Publikasi : 13560.2016
Katalog : 1105017.13
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : xii + 49 halaman

Naskah:

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat

Penyunting:

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat

Desain Cover:

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat

Penerbit:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Pencetak:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (UU No. 28 Tahun 28 Tentang Hak Cipta Pasal 43 huruf b).

Tim Penyusun

- Pengarah** : Ir. Pitono, MAP
- Penanggung Jawab** : Iman Teguh Raharto, S.Si, M.Si
- Penanggung Jawab Teknis** : Lidya Sri Yeni, S.ST, M.Si
- Penulis Naskah** : Riza Ulfina, S.ST, M.S.E.
- Infografis dan Layout** : Yanda Frimahatta, S.ST
- Penyunting** : Deswaty, S.ST
Sumi Lestari, S.Si

<https://sumber.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Proses pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dijalankan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021. Pada tahun 2020, pembangunan ini telah masuk dalam tahun keempat dari RPJMD Tahun 2016-2021. Oleh karena itu publikasi Perkembangan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 2015-2020 ini disusun dengan tujuan untuk melihat perkembangan pembangunan daerah Sumatera Barat selama tahun 2015-2020.

Pembahasan dalam publikasi ini akan dibatasi pada capaian pembangunan berdasarkan beberapa indikator ekonomi makro, indikator kesejahteraan sosial yang juga tertuang dalam RPJMD dan indikator lainnya. Indikator Ekonomi Makro terdiri dari Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, Inflasi dan Ekspor Impor. Indikator kesejahteraan sosial terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan komponen pembentuknya (Angka Harapan Hidup dan Rata-rata Lama Sekolah), Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran dan Nilai Tukar Petani (NTP). Selain itu juga akan dibahas perkembangan indikator pariwisata dan Indeks Pembangunan Desa (IPD).

Publikasi ini dapat terbit berkat adanya kerja sama dan partisipasi dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, kami sampaikan terima kasih. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan pembaca.

Padang, Desember 2020

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Barat



Ir. PITONO, MAP

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
1. Pendahuluan	1
2. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Barat, 2015-2020	7
2.1 Penduduk	9
2.2 PDRB Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota	12
2.3 Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Menurut Lapangan Usaha)	15
2.4 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha	18
2.5 Inflasi	20
2.6 Ekspor dan Impor	23
3. Perkembangan Indikator Sosial Kesejahteraan Provinsi Sumatera Barat, 2015-2020	25
3.1 Tingkat Kemiskinan	27
3.2 Tingkat Pengangguran	32
3.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	35
3.4 Nilai Tukar Petani (NTP)	38
4. Perkembangan Indikator Pariwisata dan Indeks Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2015-2020	41
4.1 Pariwisata	43
4.2 Indeks Pembangunan Daerah (IPD)	46
Daftar Pustaka	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2020 (Jiwa)	10
Tabel 2.2.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2015-2019 (Milyar Rupiah)	13
Tabel 2.3.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2015-2019 (Milyar Rupiah)	14
Tabel 2.4.	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Provinsi Sumatera Barat, 2015-2019 (Persen)	19
Tabel 2.6.	Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, 2015-2019 (Juta US\$).....	23
Tabel 3.1.	Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat 2015-2020	27
Tabel 3.2.	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat 2015-2019	30
Tabel 3.3.	TPT Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2015-2020	34
Tabel 3.4.	IPM Menurut Komponen Pembentuknya Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia, 2015-2019.....	36
Tabel 3.5.	IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2015-2019	37
Tabel 4.1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Provinsi Sumatera Barat, 2015-2020.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat 2015-2020 (Jiwa) ...9
Gambar 2.2.	Rasio Ketergantungan Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia, 2010-2035 (Persen).....11
Gambar 2.3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia,15
Gambar 2.4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (Y-on-Y) dan (Q-to-Q) Provinsi Sumatera Barat, 2019-202017
Gambar 2.5.	Perkembangan Inflasi Kota Padang, Kota Bukittinggi, Gabungan 2 Kota dan Nasional, 2015-201921
Gambar 2.6.	Perkembangan Inflasi Kota Padang, Kota Bukittinggi, Gabungan 2 Kota dan Nasional, 202022
Gambar 2.7.	Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, 2020 (Juta US\$)24
Gambar 3.1.	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia, 2015-202028
Gambar 3.2.	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 201931
Gambar 3.3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia, 2015-202032
Gambar 3.4.	TPT Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Barat, 2015-2020 (Agustus).....33
Gambar 3.5.	Perkembangan NTP Tahunan Sumatera Barat dan Nasional, 2015-2019.....38
Gambar 3.6.	Perkembangan NTP Bulanan Sumatera Barat, 202039
Gambar 4.1.	TPK Hotel Bintang dan Hotel Non Bintang di Provinsi Sumatera Barat, 2015-2019.....44
Gambar 4.2.	Jumlah Desa/Nagari Menurut Kategori IPD Provinsi Sumatera Barat, 2014-2018.....47

1 PENDAHULUAN



1. PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok, yaitu: (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*sustenance*), (2) meningkatnya rasa harga diri masyarakat sebagai manusia (*self-esteem*), dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from survitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia (Todaro dan Smith, 2003). Oleh karena itu pembangunan ekonomi bersifat multidimensi. Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan suatu negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya.

Pembangunan di Provinsi Sumatera Barat sejalan dengan konsep pembangunan diatas. Pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 disusun berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”. Sehingga pemerintah tidak hanya berfokus dalam mengejar pertumbuhan ekonomi namun juga sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat seperti pengurangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan yang terjadi ditengah masyarakat.

Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 disebutkan bahwa pembangunan daerah selama tahun 2011-2015 mengalami keberhasilan namun begitu masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus ditangani, yaitu diantaranya:

1. Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan

Jumlah dan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat telah mengalami penurunan dan lebih rendah dari tingkat kemiskinan nasional. Namun Indeks Keparahan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami peningkatan. Sebanyak 12 daerah kabupaten dan kota mempunyai tingkat kemiskinan di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kesenjangan antar rumah tangga miskin dan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan. Indikasi ini perlu diatasi dengan melakukan intervensi yang lebih spesifik kepada keluarga miskin.

2. Kualitas Sumberdaya Manusia

Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas sumberdaya manusia yang lebih komprehensif adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin tinggi IPM suatu daerah semakin tinggi kualitas sumberdaya manusia daerah tersebut. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat telah mengalami peningkatan, namun salah satu komponen IPM yang perlu mendapat perhatian adalah rata-rata lama sekolah yang masih rendah. Artinya secara rata-rata tingkat pendidikan Sumatera Barat masih rendah.

3. Struktur Ekonomi Daerah

Struktur ekonomi Sumatera Barat telah mengalami perubahan, namun peningkatan peranan sektor industri pengolahan dan konstruksi yang mempunyai produktivitas tinggi dan mempunyai dampak terhadap sektor lain belum seperti yang diharapkan.

4. Pengangguran

Tingkat pengangguran di Sumatera Barat cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, namun pada tahun 2015 sedikit diatas tingkat pengangguran nasional.

5. Pengembangan Pariwisata

Peranan pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat masih rendah, sementara potensi pariwisata tersebut sangat luar biasa baik dari sisi keindahan alam maupun dari sisi letak geografis. Berdasarkan potensi yang dimiliki tersebut, pariwisata yang menjadi sektor unggulan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta perluasan kesempatan kerja.

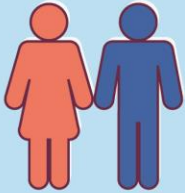
Berdasarkan permasalahan pembangunan Sumatera Barat yang dihadapi, maka Provinsi Sumatera Barat menetapkan program prioritas pembangunan daerah. Pembangunan Sumatera Barat tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam sepuluh prioritas pembangunan, diantaranya Pengembangan Pariwisata, Pengembangan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal. Untuk melihat keberhasilan pembangunan daerah digunakan beberapa indikator ekonomi dan sosial.

Publikasi ini disusun dengan tujuan untuk melihat perkembangan pembangunan daerah Sumatera Barat selama tahun 2015-2020. Pembahasan dalam publikasi ini akan dibatasi pada capaian pembangunan berdasarkan beberapa

indikator ekonomi makro, indikator kesejahteraan sosial yang juga tertuang dalam RPJMD dan indikator lainnya. Indikator Ekonomi Makro terdiri dari Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, Inflasi dan Ekspor Impor. Indikator kesejahteraan sosial terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan komponen pembentuknya (Angka Harapan Hidup dan Rata-rata Lama Sekolah), Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran dan Nilai Tukar Petani (NTP). Selain itu juga akan dibahas perkembangan indikator pariwisata dan Indeks Pembangunan Desa (IPD).

Data yang digunakan adalah data-data indikator yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Cakupan pembahasan yaitu wilayah Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

2 PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO PROVINSI SUMATERA BARAT 2015-2020



Rasio Jenis Kelamin
Tahun 2020

99,43

Diantara **100** orang perempuan terdapat **99** orang laki-laki



Jumlah Penduduk Sumatera Barat

2015	2020
5,20 juta jiwa	5,50 juta jiwa

Rasio Ketergantungan Tahun 2020

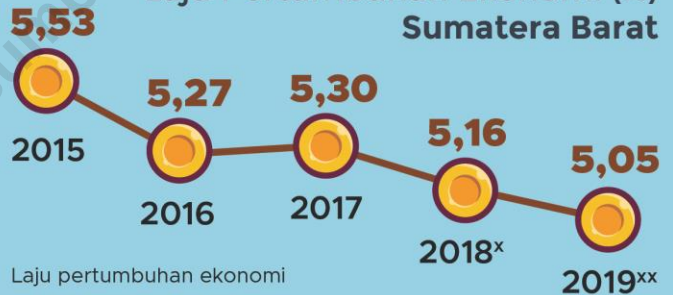
54,80

Setiap **100** orang yang produktif mempunyai tanggungan sekitar **55** orang yang belum/tidak produktif

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota 2010-2020 Provinsi Sumatera Barat, BPS



Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
Sumatera Barat



Laju pertumbuhan ekonomi **cenderung melambat** dalam lima tahun terakhir

^xAngka Sementara ^{xx}Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

Laju Inflasi Gabungan Dua Kota
di Sumatera Barat

Tahun 2015
1,08 %

Tahun 2019
1,66 %

▶ Laju Inflasi Kota Padang 2015
0,85%

▶ Laju Inflasi Kota Bukittinggi 2015
2,79%

▶ Laju Inflasi Kota Padang 2019
1,72%

▶ Laju Inflasi Kota Bukittinggi 2019
1,31%



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

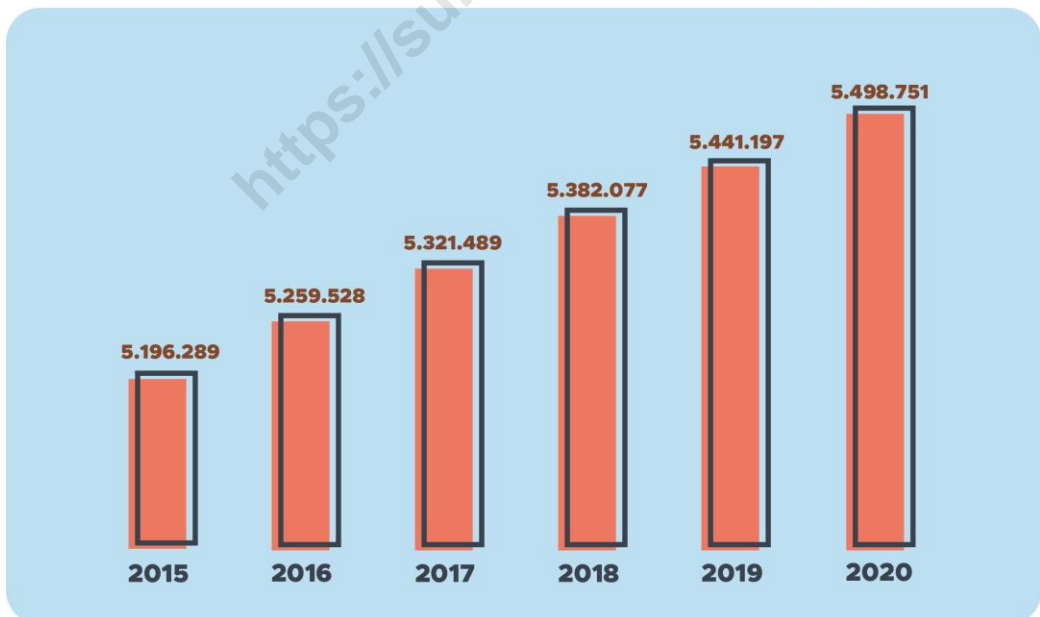
2. PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO PROVINSI SUMATERA BARAT, 2015-2020

2.1 Penduduk

Provinsi Sumatera Barat memiliki luas wilayah 42.012,89 km². Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2015-2020 terus mengalami peningkatan (gambar 2.1). Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 sebanyak 5.498.751 jiwa, mengalami peningkatan sebanyak 302.462 jiwa dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2015 yaitu 5.196.289 jiwa. Namun laju pertumbuhan penduduk Sumatera Barat tahun 2015-2020 (1,14 persen) mengalami penurunan dibandingkan laju pertumbuhan tahun 2010-2015 (1,33 persen). Untuk wilayah Pulau Sumatera, laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2020 merupakan laju pertumbuhan ketiga terendah setelah Provinsi Lampung (0,98 persen) dan Sumatera Utara (1,08 persen).

Gambar 2.1.

Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat 2015-2020 (Jiwa)



Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota 2010-2020 Provinsi Sumatera Barat, BPS

Pada tahun 2020, jumlah penduduk perempuan Provinsi Sumatera Barat lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini ditunjukkan dari rasio jenis kelamin 2020 yaitu 99,43. Jika dilihat menurut wilayah kabupaten/kota (tabel 2.1),

wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbesar pada tahun 2020 yaitu Kota Padang sebanyak 962.196 jiwa, sebaliknya Kota Padang Panjang memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu 54.421 jiwa.

Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat, 2020 (Jiwa)

Kabupaten / Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Kab. Kep. Mentawai	48 700	44 875	93 575	108,52
02. Kab. Pesisir Selatan	231 998	235 064	467 062	98,70
03. Kab. Solok	185 989	189 733	375 722	98,03
04. Kab. Sijunjung	120 792	120 124	240 916	100,56
05. Kab. Tanah Datar	170 713	178 181	348 894	95,81
06. Kab. Padang Pariaman	205 989	211 792	417 781	97,26
07. Kab. Agam	243 601	251 013	494 614	97,05
08. Kab. Lima Puluh Kota	191 872	194 117	385 989	98,84
09. Kab. Pasaman	140 974	142 890	283 864	98,66
10. Kab. Solok Selatan	87 820	85 964	173 784	102,16
11. Kab. Dharmasraya	131 485	121 998	253 483	107,78
12. Kab. Pasaman Barat	228 630	223 075	451 705	102,49
71. Kota Padang	481 478	480 718	962 196	100,16
72. Kota Solok	35 764	36 342	72 106	98,41
73. Kota Sawahlunto	31 333	31 694	63 027	98,86
74. Kota Padang Panjang	27 221	27 200	54 421	100,08
75. Kota Bukittinggi	64 505	68 218	132 723	94,56
76. Kota Payakumbuh	68 493	68 994	137 487	99,27
77. Kota Pariaman	44 180	45 222	89 402	97,70
Sumatera Barat	2 741 537	2 757 214	5 498 751	99,43

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota 2010-2020 Provinsi Sumatera Barat, BPS

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif (usia 15-64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) dan tidak produktif lagi (65+ tahun). Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Gambar 2.2.
Rasio Ketergantungan Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia,
2010-2035 (Persen)



Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, BPS

Rasio ketergantungan Provinsi Sumatera Barat terlihat menurun dari tahun 2010 sampai tahun 2035. Namun demikian angka rasio ketergantungannya masih diatas 50 persen. Sedangkan rasio ketergantungan Indonesia mulai tahun 2015 sudah dibawah 50 persen dan diperkirakan terus menurun sampai tahun 2030. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat tidak mengalami bonus demografi pada periode 2010-2035. Sebaliknya secara nasional, Indonesia mengalami bonus demografi mulai tahun 2015, dan mencapai puncaknya pada tahun 2030.

2.2 PDRB Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

Secara nominal, nilai PDRB Provinsi Sumatera Barat atas dasar harga berlaku dari tahun 2015-2019 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB Provinsi Sumatera Barat sebesar 179,95 triliun rupiah dan pada tahun 2019 telah mencapai 246,42 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 66,47 triliun rupiah (Tabel 2.2). Naiknya nilai PDRB ini bisa disebabkan oleh meningkatnya produksi dari lapangan usaha. Nilai PDRB pada tahun 2019 ini sudah melampaui dari proyeksi PDRB yang ingin dicapai seperti yang tertuang dalam RPJMD Sumatera Barat yaitu 178,64 triliun rupiah.

Sejalan dengan perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku tingkat provinsi, PDRB atas dasar harga berlaku setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat juga mengalami kenaikan selama tahun 2015-2019. Kabupaten/Kota yang memiliki PDRB tertinggi selama tahun 2015-2019 adalah Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam. Pada tahun 2019 nilai PDRB ketiga kabupaten/kota tersebut mencapai masing-masing 62.457,55 milyar rupiah; 21.287,27 milyar rupiah dan 20.549,47 milyar rupiah. Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki nilai PDRB terendah selama 2015-2019 adalah Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto dan Kota Solok, dengan nilai PDRB tahun 2019 masing-masing yaitu 3.476,56 milyar rupiah; 3.681,65 milyar rupiah dan 4.050,43 milyar rupiah.

Tabel 2.2.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat, 2015-2019 (Milyar Rupiah)

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018 ^x	2019 ^{xx}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Kab. Kep. Mentawai	3 395,69	3 725,73	4 001,87	4 253,49	4 643,67
02. Kab. Pesisir Selatan	10 197,17	11 271,40	12 069,52	13 049,68	14 044,81
03. Kab. Solok	10 165,29	11 053,49	11 783,87	12 657,03	13 586,89
04. Kab. Sijunjung	6 955,43	7 439,23	7 927,67	8 491,26	9 133,60
05. Kab. Tanah Datar	9 901,48	10 734,51	11 428,08	12 205,44	13 093,98
06. Kab. Padang Pariaman	15 845,89	17 532,87	19 038,38	20 441,91	21 287,27
07. Kab. Agam	15 247,79	16 693,05	17 834,99	19 150,62	20 549,47
08. Kab. Lima Puluh Kota	11 582,97	12 677,54	13 531,19	14 522,50	15 615,53
09. Kab. Pasaman	6 505,37	7 335,79	7 801,98	8 320,78	8 908,51
10. Kab. Solok Selatan	4 236,19	4 598,22	4 893,87	5 216,18	5 575,24
11. Kab. Dharmasraya	7 725,47	8 437,66	9 054,28	9 700,23	10 351,22
12. Kab. Pasaman Barat	11 712,94	12 794,25	13 699,70	14 607,23	15 400,99
71. Kota Padang	45 092,95	49 386,26	53 091,10	57 519,79	62 457,55
72. Kota Solok	2 964,89	3 241,25	3 469,04	3 729,20	4 050,43
73. Kota Sawahlunto	2 715,01	2 937,95	3 165,21	3 405,16	3 681,65
74. Kota Padang Panjang	2 533,05	2 774,05	2 974,35	3 198,67	3 476,56
75. Kota Bukittinggi	6 169,75	6 783,09	7 453,11	8 012,72	8 699,58
76. Kota Payakumbuh	4 654,98	5 203,12	5 639,68	6 136,25	6 828,56
77. Kota Pariaman	3 699,44	4 036,74	4 309,01	4 616,86	5 008,38
Jumlah	181 301,73	198 656,20	213 166,90	229 235,01	246 393,90
Sumatera Barat¹	179 951,98	196 099,18	213 893,47	230 571,99	246 422,72

Catatan: ^xAngka Sementara

^{xx}Angka Sangat Sementara

¹Dihitung secara terpisah dari penghitungan PDRB Kabupaten/Kota

Sumber: Sumatera Barat dalam Angka 2020, BPS

Jika dilihat berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, perkembangan angka PDRB Provinsi Sumatera Barat selama periode 2015-2019 juga mengalami peningkatan. Hal yang sama juga terjadi pada PDRB atas dasar harga konstan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Pada Tabel 2.3 terlihat bahwa

PDRB Provinsi Sumatera Barat meningkat dari 140,72 triliun rupiah tahun 2015 menjadi 172,32 triliun rupiah.

Tabel 2.3.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat, 2015-2019 (Milyar Rupiah)

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Kab. Kep. Mentawai	2 483,57	2 608,13	2 741,55	2 876,24	3 013,19
02. Kab. Pesisir Selatan	7 816,21	8 232,59	8 678,05	9 142,70	9 582,87
03. Kab. Solok	8 082,58	8 511,65	8 964,87	9 432,54	9 911,02
04. Kab. Sijunjung	5 537,78	5 829,04	6 135,76	6 448,36	6 759,89
05. Kab. Tanah Datar	7 955,07	8 355,07	8 782,10	9 227,41	9 689,71
06. Kab. Padang Pariaman	11 085,45	11 697,04	12 350,19	13 024,26	13 350,78
07. Kab. Agam	11 911,29	12 567,02	13 249,25	13 946,00	14 617,49
08. Kab. Lima Puluh Kota	9 125,38	9 611,26	10 123,65	10 655,89	11 198,94
09. Kab. Pasaman	5 085,32	5 342,90	5 614,28	5 894,86	6 180,21
10. Kab. Solok Selatan	3 267,81	3 435,70	3 612,64	3 794,20	3 979,92
11. Kab. Dharmasraya	6 156,75	6 490,29	6 843,18	7 206,47	7 565,21
12. Kab. Pasaman Barat	9 357,82	9 857,62	10 384,39	10 928,77	11 419,50
71. Kota Padang	35 180,55	37 350,20	39 675,73	42 090,96	44 481,75
72. Kota Solok	2 307,25	2 440,13	2 580,78	2 727,41	2 878,17
73. Kota Sawahlunto	2 251,78	2 380,52	2 517,15	2 656,19	2 797,94
74. Kota Padang Panjang	2 066,25	2 186,01	2 312,71	2 445,31	2 581,91
75. Kota Bukittinggi	4 874,25	5 168,98	5 483,40	5 813,63	6 155,22
76. Kota Payakumbuh	3 551,23	3 767,27	3 997,85	4 239,77	4 490,84
77. Kota Pariaman	2 900,33	3 062,31	3 234,23	3 412,14	3 594,08
Jumlah	140 996,68	148 893,74	157 281,78	165 963,11	174 248,64
Sumatera Barat¹	140 719,47	148 134,24	155 984,36	164 033,66	172 320,50

Catatan: * Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara

¹ Dihitung secara terpisah dari penghitungan PDRB Kabupaten/Kota

Sumber: Sumatera Barat dalam Angka 2020, BPS

2.3 Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Menurut Lapangan Usaha)

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang menggambarkan bagaimana capaian pembangunan suatu daerah. Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari penghitungan PDRB atas dasar harga konstan. Gambar 2.3 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari tahun 2015-2019 berfluktuasi, tetapi cenderung melambat, kecuali di tahun 2017. Perlambatan yang cukup besar terjadi di tahun 2016. Walaupun laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat selama lima tahun ini trennya melambat tetapi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat masih diatas pertumbuhan ekonomi nasional (Gambar 2.3).

Gambar 2.3.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia,
2015-2019



Sumber: Indikator Strategis Provinsi Sumatera Barat 2019, BPS

Banyak faktor yang mempengaruhi perlambatan perekonomian suatu daerah, baik berasal dari faktor internal dan eksternal daerah tersebut. Misalnya pada tahun 2016, laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebesar 5,27 persen, mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2015 yaitu 5,53 persen. Perlambatan ini sebagai akibat dari pengaruh kondisi ekonomi nasional maupun global. Selain itu juga dipengaruhi oleh lemahnya harga komoditas terutama komoditas pertanian, Hal ini

menyebabkan pendapatan rumah tangga pertanian terutamanya perkebunan mengalami penurunan. Selanjutnya penurunan pendapatan ini memicu turunnya konsumsi rumahtangga. Hal ini berdampak pada lesunya aktivitas perdagangan dan permintaan akan barang hasil industri. Sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri pengolahan juga menunjukkan pelemahan pertumbuhan (BPS, 2016).

Tentu saja telah banyak upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Provinsi Sumatera Barat, salah satunya dengan investasi. Namun menurut Syafitri dan Ariuni (2019) dalam penelitiannya investasi swasta dalam hal ini realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi PMA di Sumatera Barat tidak mampu meningkatkan perekonomian di Sumatera Barat. Justru yang memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat adalah pengeluaran belanja pemerintah dan dana perimbangan. Sehingga pemerintah Sumatera Barat hendaknya menitikberatkan pada faktor-faktor yang memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

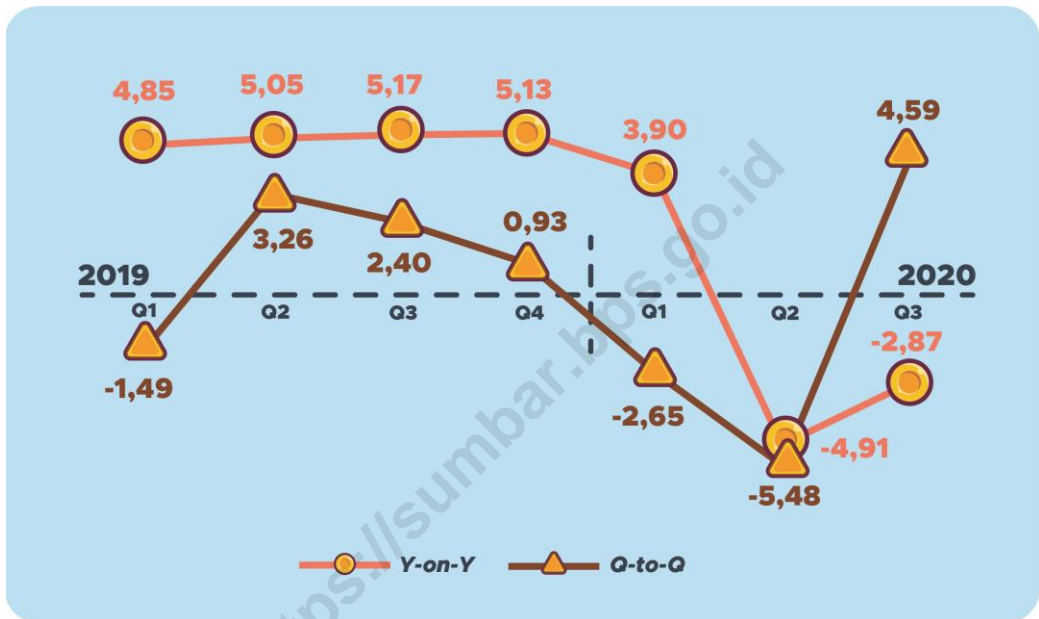
Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2020

Pada awal tahun 2020 mulai terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia dan penyebaran virusnya masih terjadi sampai saat ini. Pandemi ini tidak hanya dirasakan oleh Sumatera Barat tapi juga di seluruh dunia. Sebagai langkah pemutusan rantai penyebaran virus tersebut Pemerintah Sumatera Barat memberlakukan pembatasan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat seperti bekerja dari rumah, penutupan usaha penyedia makan dan minum dan sebagainya. Hal ini berimbas terhadap perekonomian Sumatera Barat.

Seperti yang terlihat pada gambar 2.4, pada triwulan I tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat semakin melambat dibandingkan triwulan I 2019 yaitu sebesar 3,90 persen (*Y-on-Y*). Jika dibandingkan dengan triwulan IV 2019 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat negatif yaitu -2,65 persen (*Q-to-Q*). Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah Sumatera Barat sejak bulan April-Juni 2020 ikut memberikan imbas bagi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Pada triwulan II 2020 Sumatera Barat mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif sebesar -4,91 persen (*Y-on-Y*) dibandingkan dengan triwulan II tahun 2019 (5,05

persen). Jika dibandingkan dengan triwulan I 2020 (Q-to-Q) mengalami kontraksi sebesar 5,48 persen.

Gambar 2.4.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (Y-on-Y) dan (Q-to-Q) Provinsi Sumatera Barat, 2019-2020



Sumber: Kumpulan BRS Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat 2019-2020, BPS

Pada triwulan III 2020, perekonomian Provinsi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan (-2,87 persen) yang jauh menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (5,17 persen). Hal ini didorong oleh pertumbuhan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang berkontraksi sebesar 19,87 persen. Seiring dengan perubahan tatanan hidup baru di masa pandemi atau *new normal*, masyarakat mulai beraktivitas kembali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini membuat perekonomian perlahan mulai bangkit kembali. Laju perekonomian Provinsi Sumatera Barat pada triwulan III 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 4,59 persen dibandingkan triwulan II 2020.

2.4 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Ada 17 sektor lapangan usaha pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Lima lapangan usaha yang memberikan peranan terbesar bagi PDRB Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (24,69 persen); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor (14,61 persen); Transportasi dan Pergudangan (12,23 persen); Industri Pengolahan (10,18 persen) dan Konstruksi (9,38 persen).

Selama kurun waktu lima tahun (2015-2019) kelima lapangan usaha tersebut masih tetap mendominasi dalam pembentukan PDRB (Tabel 2.4). Namun besaran peranan masing-masing dari lapangan usaha tersebut berangsur-angsur mulai bergeser. Pada tahun 2019 persentase lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Industri Pengolahan mengalami penurunan yaitu masing-masing sebesar 22,17 persen dan 8,37 persen. Sedangkan tiga sektor lainnya mengalami kenaikan yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor (15,80 persen); Transportasi dan Pergudangan (12,60 persen) dan Konstruksi (10,09 persen).

Selain itu hampir semua lapangan usaha yang mengalami kenaikan sejak tahun 2015 kecuali Aktivitas Keuangan dan Asuransi yang turun menjadi 2,90 persen pada tahun 2019 dari 3,10 persen pada tahun 2015; serta Pengadaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi yang tetap memberikan peranan paling rendah yaitu 0,09 persen.

Tabel 2.4.
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha,
Provinsi Sumatera Barat, 2015-2019 (Persen)

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24,69	24,06	23,61	23,18	22,17
B	Pertambangan dan Penggalan	4,82	4,53	4,27	4,26	4,29
C	Industri Pengolahan	10,18	10,09	9,74	9,09	8,37
D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
F	Konstruksi	9,38	9,29	9,35	9,64	10,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	14,61	14,76	14,91	15,31	15,80
H	Transportasi dan Pergudangan	12,23	12,46	12,65	12,66	12,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,22	1,29	1,33	1,36	1,42
J	Informasi dan Komunikasi	4,85	4,99	5,28	5,47	5,82
K	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	3,10	3,17	3,10	3,01	2,90
L	Real Estat	2,00	2,01	1,97	1,96	2,01
M,N	Jasa Perusahaan	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,70	5,82	5,83	5,92	6,13
P	Jasa Pendidikan	3,67	3,84	4,13	4,20	4,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,26	1,28	1,34	1,39	1,42
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,68	1,77	1,84	1,93	2,00
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sumatera Barat dalam Angka 2020, BPS

2.5 Inflasi

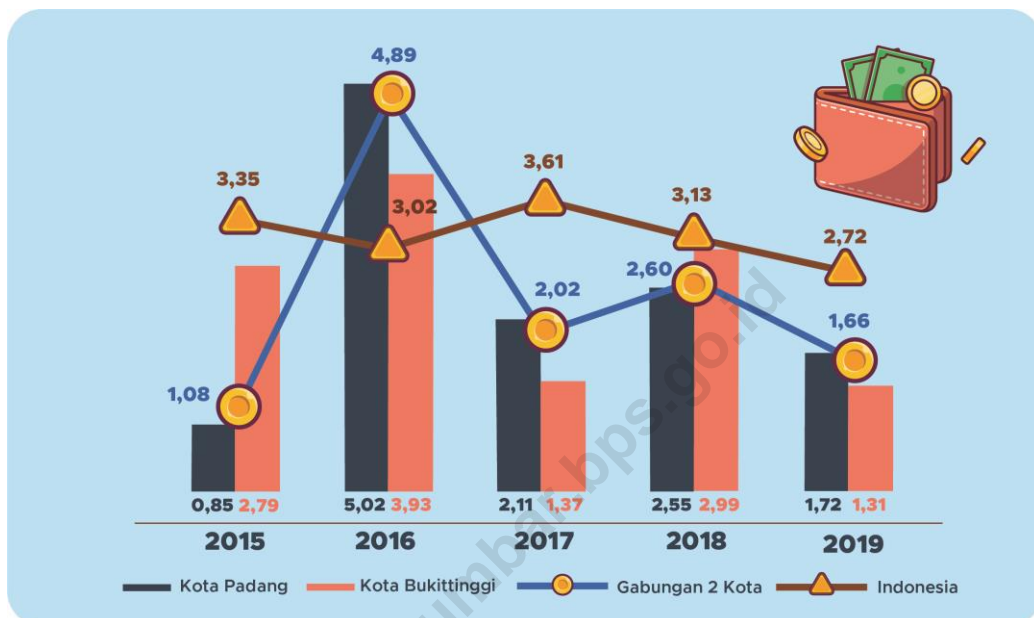
Inflasi merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang mengukur persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa di suatu waktu. Inflasi diukur menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari kelompok komoditas. Kelompok komoditas tersebut antara lain kelompok bahan makanan; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar; kelompok sandang; kelompok kesehatan; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga; serta kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

Persentase kenaikan IHK dikenal dengan inflasi, sedangkan penurunannya disebut deflasi. Ketika terjadi inflasi atau ada kenaikan harga barang maka nilai mata uang akan mengalami penurunan dan juga mengurangi daya beli masyarakat. Hal ini tentu saja berdampak terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari terutama kebutuhan bahan pokok. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi, diantaranya faktor permintaan masyarakat, gangguan produksi, distribusi, dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu peran pemerintah sangatlah diperlukan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan harga-harga barang atau jasa tersebut. Pengukuran inflasi BPS di Provinsi Sumatera Barat baru mencakup Kota Padang dan Kota Bukittinggi.

Perkembangan Inflasi Kota Padang dan Kota Bukittinggi selama tahun 2015-2019 berfluktuasi (gambar 2.5). Secara gabungan 2 kota, inflasi Kota Padang dan Kota Bukittinggi selalu berada dibawah inflasi tingkat nasional kecuali tahun 2016, dimana inflasi kedua kota tersebut jauh diatas angka nasional yaitu 4,89 persen sedangkan nasional sebesar 3,02 persen. Inflasi pada tahun 2016 tersebut merupakan tingkat inflasi tertinggi selama tahun 2015-2019, sedangkan inflasi terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 1,08 persen.

Kenaikan inflasi tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 ini merupakan andil dari kenaikan harga komoditas cabe merah dan angkutan udara di hari raya umat Islam atau bulan Juli. Selain itu juga ada kenaikan harga bawang merah dan telur ayam ras. Jika dilihat keterbandingan antara kedua kota inflasi di Provinsi Sumatera Barat, selama tahun 2015-2019 inflasi Kota Padang selalu lebih tinggi dibandingkan inflasi Kota Bukittinggi kecuali di tahun 2015 dan 2018.

Gambar 2.5.
Perkembangan Inflasi Kota Padang, Kota Bukittinggi,
Gabungan 2 Kota dan Nasional, 2015-2019



Sumber: Indikator Strategis Provinsi Sumatera Barat 2019, BPS

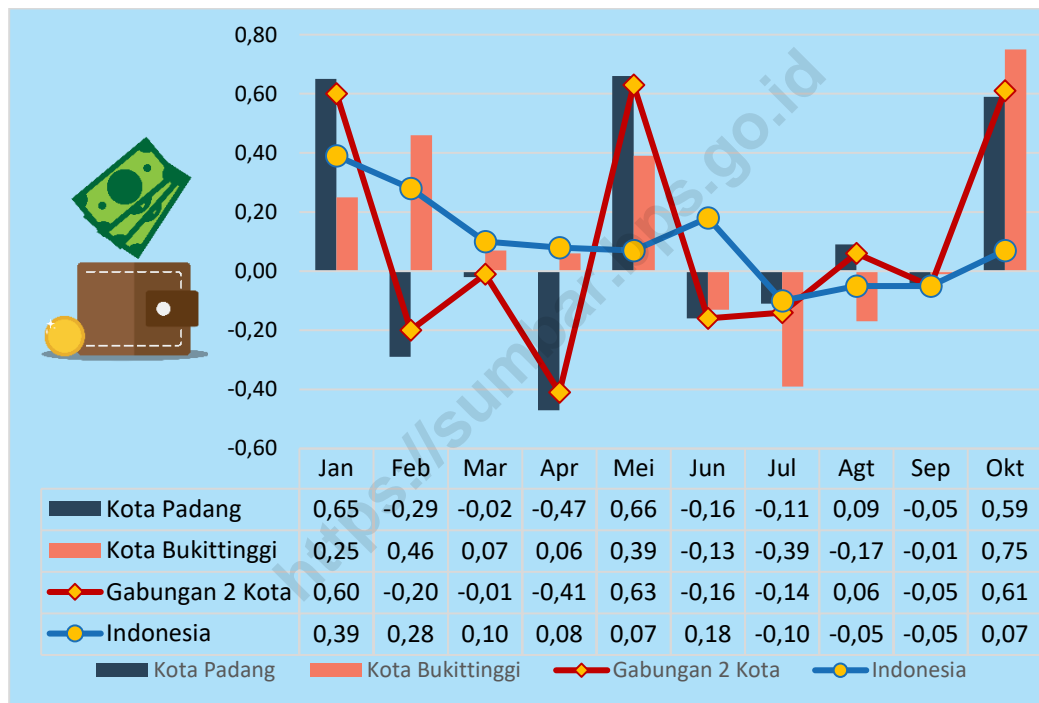
Pertumbuhan Inflasi Tahun 2020

Pada awal tahun 2020 inflasi Kota Padang berada diatas inflasi nasional yaitu 0,65 persen sedangkan nasional 0,39 persen. Sebaliknya Inflasi Kota Bukittinggi berada dibawah nasional yaitu sebesar 0,25 persen. Pandemi COVID19 memberikan pengaruh terhadap perubahan harga-harga barang. Pada gambar 2.6 terlihat bahwa terjadi deflasi sejak Februari sampai September 2020 kecuali bulan Mei, Agustus dan Oktober 2020 (gabungan 2 kota). Sedangkan laju inflasi Indonesia terus menurun, walaupun pada bulan Juni sempat mengalami kenaikan. Namun terjadi deflasi sampai September 2020.

Jika dilihat berdasarkan kota inflasi di Sumatera Barat, terjadi penurunan persentase IHK (deflasi) di Kota Padang sejak Februari sampai September 2020, kecuali bulan Mei dan Agustus 2020. Namun keadaan Oktober 2020 terjadi kenaikan harga-harga (inflasi). Kelompok komoditas terbesar yang memberikan andil terhadap deflasi selama periode Februari-September 2020 adalah kelompok transportasi. Deflasi pada kelompok ini terjadi pada Bulan Februari, Juni, Juli dan September 2020 yaitu

berturut-turut sebesar 2,07 persen; 0,66 persen; 0,85 persen dan 1,32 persen. Selain itu kelompok komoditas yang mengalami deflasi terbesar yaitu kelompok makanan, minuman, tembakau sebesar 0,55 persen (Maret 2020) dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,47 persen (April 2020).

Gambar 2.6.
Perkembangan Inflasi Kota Padang, Kota Bukittinggi,
Gabungan 2 Kota dan Nasional, 2020



Sumber: Kumpulan BRS Perkembangan Inflasi Sumatera Barat 2020, BPS

Lain halnya yang terjadi di Kota Bukittinggi, dari Februari-Mei 2020 masih terjadi peningkatan persentase perubahan IHK (inflasi). Namun pada bulan berikutnya (Juni 2020) sampai September 2020 terjadi penurunan persentase perubahan IHK (deflasi). Penurunan terbesar terjadi pada kelompok komoditas makanan, minuman, tembakau yaitu sebesar 0,81 persen (Juni 2020); 1,25 persen (Juli 2020); 0,86 persen (Agustus 2020); dan 0,13 persen (September 2020). Kemudian pada bulan Oktober 2020 Kota Bukittinggi mengalami kenaikan perubahan IHK (inflasi).

2.6 Ekspor dan Impor

Perkembangan ekspor dan impor dari Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2015-2019 berfluktuasi. Seperti yang terlihat pada tabel 2.5, nilai ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar US\$ 2.046,27 juta, kemudian terus turun menjadi US\$ 1.339,15 juta pada tahun 2019. Sebaliknya untuk impor, nilai impor tertinggi terjadi di tahun 2015 yaitu sebesar US\$ 632,80 juta dan pada tahun 2019 turun menjadi US\$ 436,20 juta. Neraca perdagangan Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2015-2019 selalu mengalami surplus walaupun secara nominal berfluktuasi. Pada tahun 2019 mencapai US\$ 900,95 juta dimana mengalami penurunan 14,38 persen dibandingkan neraca perdagangan tahun 2018.

Tabel 2.5.
Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan
Provinsi Sumatera Barat, 2015-2019 (Juta US\$)

Tahun	Ekspor	Impor	Neraca Perdagangan
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	1 748,01	632,80	1 115,21
2016	1 708,28	345,25	1 363,03
2017	2 046,27	446,26	1 600,01
2018	1 598,61	546,34	1 052,27
2019	1 339,15	438,20	900,95

Sumber: Statistik Ekspor Impor Provinsi Sumatera Barat 2019, BPS

Komoditi yang paling besar nilai ekspornya selama periode 2015-2019 adalah minyak kelapa sawit. Hal ini sejalan dengan jumlah produksi perkebunan rakyat terbesar di Provinsi Sumatera Barat yaitu kelapa sawit. Produksi kelapa sawit Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 mencapai 567.930 ton. Pada tahun 2019, tiga jenis komoditi ekspor terbesar berturut-turut yaitu minyak kelapa sawit (US\$ 941,35 juta), karet remah (US\$ 229,98 juta) dan semen (US\$ 71,41 juta). Negara tujuan ekspor terbesar pada tahun 2019 yaitu India (US\$ 281,92 juta), Amerika Serikat (US\$ 266,36 juta) dan Bangladesh (US\$ 174,88 juta).

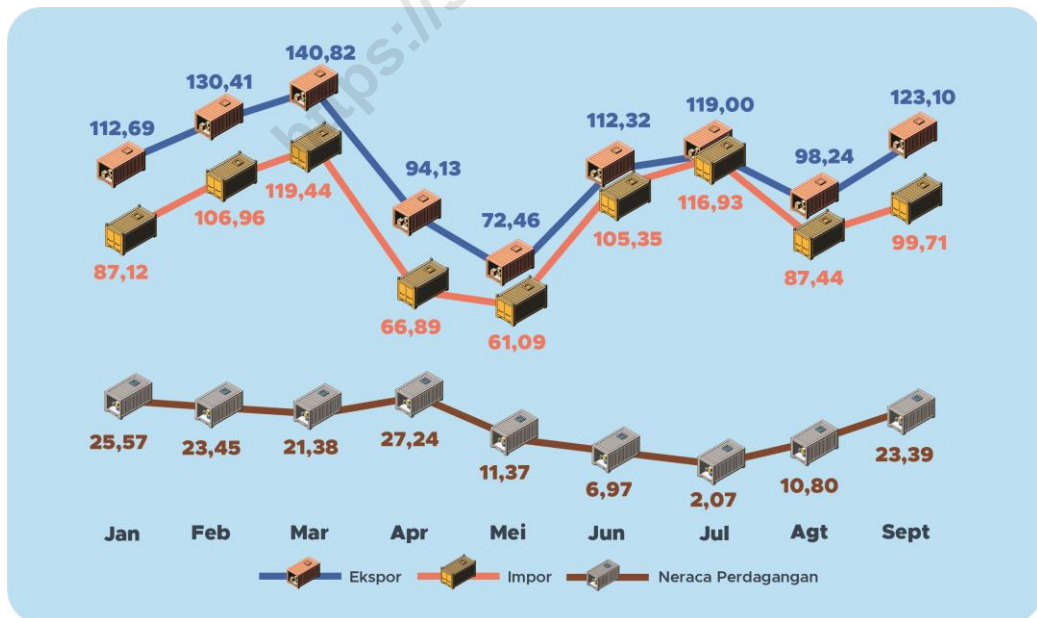
Komoditi impor terbesar pada tahun 2019 adalah bahan bakar, bahan penyemir dll (US\$ 341,83 juta); bahan kimia dan produknya (US\$ 39,84 juta); serta bahan makanan dan binatang hidup (US\$ 18,50 juta). Negara asal impor terbesar

berasal dari Singapura (US\$ 319,93 juta), Malaysia (US\$ 25,56 juta) dan Jepang (US\$23,72 juta).

Perkembangan Ekspor dan Impor Tahun 2020

Perkembangan ekspor dan impor Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2020 sangatberfluktuasi (gambar 2.7). Total nilai ekspor selama Januari-September 2020 mencapai US\$ 1.003,18 juta atau naik 4,33 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai ekspor terendah terjadi pada bulan Mei 2020 yaitu hanya US\$ 72,46 juta dan tertinggi terjadi di bulan Maret 2020 sebesar US\$ 140,82 juta. Sedangkan untuk impor, secara kumulatif nilai impor selama Januari-September 2020 mencapai US\$ 152,23 juta atau mengalami penurunan 58,81 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Neraca perdagangan Provinsi Sumatera Barat masih mengalami surplus selama tahun 2020.

Gambar 2.7.
Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan
Provinsi Sumatera Barat, 2020 (Juta US\$)



Sumber: Kumpulan BRS Perkembangan Ekspor Impor Sumatera Barat 2020, BPS

3 PERKEMBANGAN INDIKATOR SOSIAL KESEJAHTERAAN PROVINSI SUMATERA BARAT 2015-2020

Tingkat Kemiskinan Penduduk Sumatera Barat Maret 2020

6,28 %



Dalam 6^{*)} tahun terakhir, sebanyak **35.379** jiwa telah keluar dari garis kemiskinan

*)Maret 2015-Maret 2020

Atau setara **344.230** jiwa



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Barat Agustus 2020

6,88 %

Setiap **100 orang Angkatan Kerja** terdapat **6 sampai 7 orang** yang **MENGANGGUR**

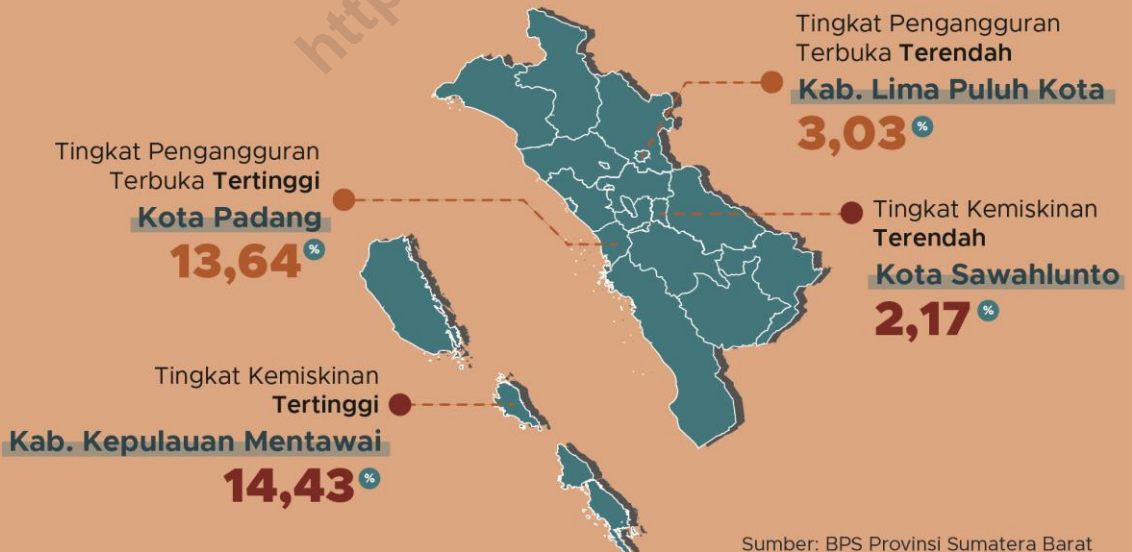


Dalam 6^{*)} tahun terakhir, pengangguran di Sumatera Barat didominasi oleh pengangguran yang berpendidikan **SLTA ke atas**



Tingkat Kemiskinan Tahun 2019 dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020

Berdasarkan Kabupaten/Kota



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat 2019

72,39

Termasuk ke dalam **Kategori TINGGI**



Dalam 5^{*)} tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat **selalu mengalami peningkatan**

3. PERKEMBANGAN INDIKATOR SOSIAL KESEJAHTERAAN PROVINSI SUMATERA BARAT, 2015-2020

3.1 Tingkat Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan Garis kemiskinan (GK) per bulan untuk mengklasifikasikan penduduk ke dalam golongan miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan merupakan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan. Garis kemiskinan yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin Maret 2020 adalah Rp.544.315,- (kapita/bulan). Selama tahun 2015-2020 garis kemiskinan Provinsi Sumatera Barat naik 41,65 persen.

Tabel 3.1.

Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat 2015-2020

Tahun	Bulan	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Penduduk Miskin (persen)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P ₁)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P ₂)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2015	Maret	384 277	379 609	7,31	0,98	0,21
	September	403 947	349 530	6,71	1,26	0,29
2016	Maret	425 141	371 555	7,09	1,10	0,24
	September	438 075	376 510	7,14	1,12	0,28
2017	Maret	453 612	364 513	6,87	1,00	0,23
	September	455 797	359 990	6,75	0,99	0,23
2018	Maret	476 554	357 130	6,65	1,04	0,24
	September	485 633	353 240	6,55	0,96	0,21
2019	Maret	503 652	348 220	6,42	0,94	0,21
	September	529 700	343 090	6,29	0,78	0,15
2020	Maret	544 315	344 230	6,28	0,92	0,20

Sumber: Indikator Strategis Provinsi Sumatera Barat 2019, BPS

Penduduk dikategorikan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK. Pada Tabel 3.1 menunjukkan jumlah penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat dari Maret 2015-Maret 2020 turun secara signifikan dari 379.609 jiwa (Maret 2015) menjadi 344.230 jiwa (Maret 2020).

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah, karena dari tingkat kemiskinan mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera pada dasarnya merupakan tujuan dari pembangunan daerah. Begitu juga halnya dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, penurunan tingkat kemiskinan dijadikan salah satu dari prioritas RPJMD. Tingkat kemiskinan digambarkan dengan persentase penduduk miskin.

Gambar 3.1.
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia, 2015-2020



Sumber: Indikator Strategis Provinsi Sumatera Barat 2019, BPS

Tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dari tahun Maret 2015-Maret 2020 mengalami penurunan, kecuali di Maret 2016 terjadi kenaikan persentase penduduk miskin dari 6,71 persen (September 2015) menjadi 7,09 persen (Maret 2016). Pada Maret 2020, tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat 6,28 persen. Selama kurun waktu 2015-2020 ini tingkat kemiskinan Sumatera Barat selalu berada di bawah tingkat kemiskinan nasional.

Ukuran tingkat kemiskinan tidak bisa menjelaskan seberapa miskin/sengsara penduduk miskin tersebut, mengingat ukuran tersebut tidak banyak berubah ketika

sekelompok penduduk miskin menjadi lebih miskin lagi dari satu waktu ke waktu lain. Ukuran kemiskinan juga mempertimbangkan sebaran atau distribusi pendapatan diantara penduduk miskin. Ukuran tersebut adalah tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan (Foster;1984 dalam Irawan dkk; 2016).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antar penduduk miskin.

Indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2015-2020 cukup berfluktuasi (Tabel 3.1). Sejak tahun 2018 sampai 2019 (September) nilai P1 mengalami penurunan dan tahun 2020 (Maret) naik menjadi 0,92 persen. Ini berarti kesenjangan antara rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk miskin dan garis kemiskinan adalah relatif kecil, yaitu sebesar 0,92 persen.

Hal yang sama juga terjadi dengan nilai indeks keparahan kemiskinan Provinsi Sumatera Barat juga berfluktuasi selama 2015-2020. Nilai P2 tertinggi pada September 2015 yaitu 0,29 persen dan terendah pada September 2019 sebesar 0,15 persen. Namun Nilai P2 Sumatera Barat naik menjadi 0,20 persen pada Maret 2020. Walaupun begitu, ini menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran konsumsi antar penduduk miskin pada Maret 2020 tidak begitu timpang.

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota

Berdasarkan Tabel 3.2 terlihat bahwa dari tahun 2015-2019 persentase penduduk miskin di semua kabupaten/kota mengalami penurunan setiap tahunnya. Angka kemiskinan yang terus menurun menunjukkan kesejahteraan penduduk Provinsi Sumatera Barat meningkat dari tahun 2015-2019.

Tabel 3.2.
 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
 2015-2019

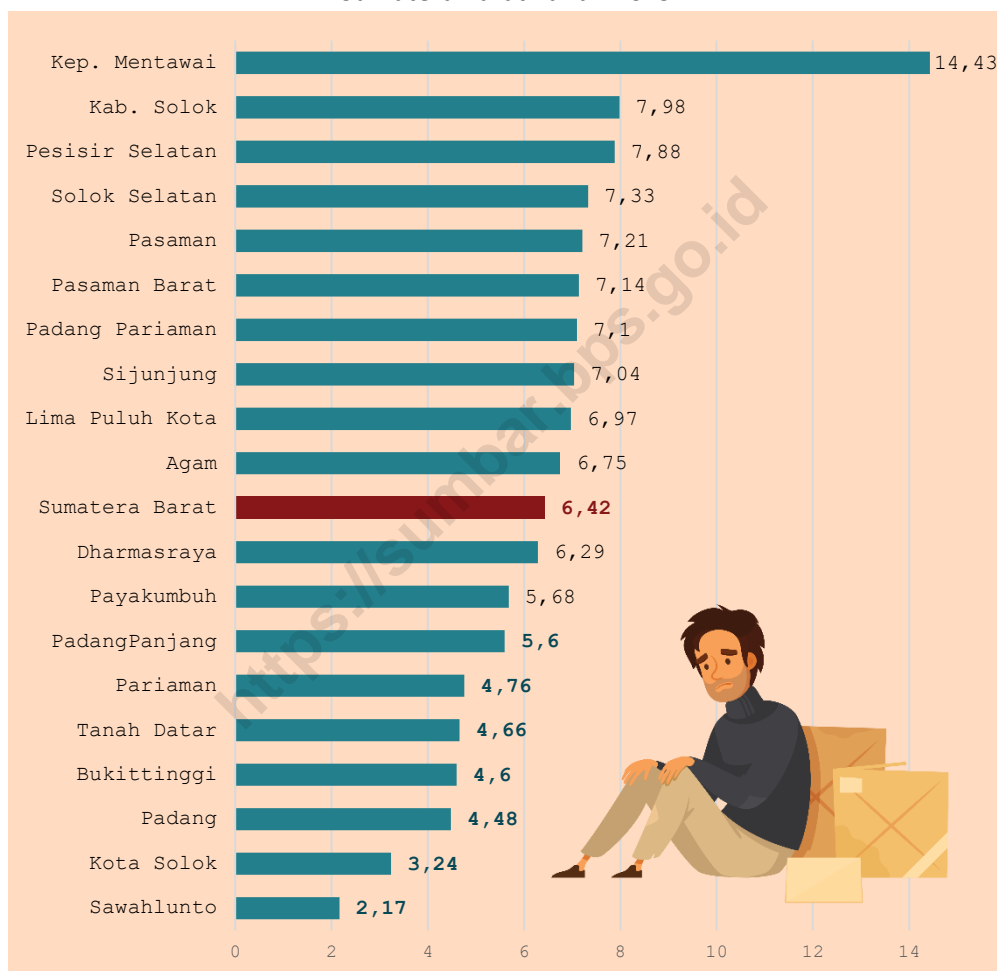
Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018*	2019 ^{xx}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Kab. Kep. Mentawai	15,52	15,12	14,67	14,44	14,43
02. Kab. Pesisir Selatan	8,46	7,92	7,79	7,59	7,88
03. Kab. Solok	10,00	9,32	9,06	8,88	7,98
04. Kab. Sijunjung	7,87	7,60	7,35	7,11	7,04
05. Kab. Tanah Datar	5,82	5,68	5,56	5,32	4,66
06. Kab. Padang Pariaman	8,86	8,91	8,46	8,04	7,10
07. Kab. Agam	7,58	7,83	7,59	6,76	6,75
08. Kab. Lima Puluh Kota	7,65	7,59	7,15	6,99	6,97
09. Kab. Pasaman	8,14	7,65	7,41	7,31	7,21
10. Kab. Solok Selatan	7,52	7,35	7,21	7,07	7,33
11. Kab. Dharmasraya	7,17	7,16	6,68	6,42	6,29
12. Kab. Pasaman Barat	7,93	7,40	7,26	7,34	7,14
71. Kota Padang	4,93	4,68	4,74	4,70	4,48
72. Kota Solok	4,12	3,86	3,66	3,30	3,24
73. Kota Sawahlunto	2,22	2,21	2,01	2,39	2,17
74. Kota Padang Panjang	6,74	6,75	6,17	5,88	5,60
75. Kota Bukittinggi	5,36	5,48	5,35	4,92	4,60
76. Kota Payakumbuh	6,67	6,46	5,88	5,77	5,68
77. Kota Pariaman	5,42	5,23	5,20	5,03	4,76
Sumatera Barat	7,31	7,09	6,87	6,65	6,42

Sumber: Sumatera Barat dalam Angka 2017-2020, BPS

Selama tahun 2015-2018 tiga kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok dan Kabupaten Padang Pariaman. Tahun 2019, Kabupaten Padang Pariaman mengalami penurunan persentase penduduk miskin yang cukup signifikan sehingga posisi tiga tertinggi di tempati oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok dan Kabupaten Pesisir

Selatan. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki tingkat kemiskinan terendah selama 2015-2019 adalah Kota Sawahlunto yaitu berkisar 2 persen.

Gambar 3.2.
 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019



Sumber: Sumatera Barat dalam Angka 2020, BPS

Gambar 3.2 menunjukkan bahwa hampir semua kabupaten di Provinsi Sumatera Barat memiliki tingkat kemiskinan diatas tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat kecuali Kab. Tanah Datar dan Kab. Dharmasraya. Namun hal ini cukup menggembirakan dibandingkan keadaan pada tahun 2016. Dimana pada tahun 2016 ada 11 kabupaten/kota yang tingkat kemiskinan diatas tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat, sedangkan tahun 2019 ada 10 kabupaten/kota.

3.2 Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Gambar 3.3 memperlihatkan bahwa selama periode 2015-2020 TPT Provinsi Sumatera Barat berfluktuasi dan nilainya selalu berada diatas angka nasional kecuali pada Agustus 2016. TPT Provinsi Sumatera Barat Agustus 2016 sebesar 5,09 persen sedangkan TPT Indonesia 5,61 persen. Jika dibandingkan dengan Februari 2015, TPT Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dari 5,99 persen pada Februari 2015 menjadi 5,22 persen pada Februari 2020 atau turun 0,77 poin. Berbeda dengan tren sebelumnya yang cenderung menurun, nilai TPT pada Agustus 2020 (6,88 persen) mengalami peningkatan sebesar 1,50 poin dibandingkan Agustus 2019 (5,38 persen).

Gambar 3.3.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia, 2015-2020



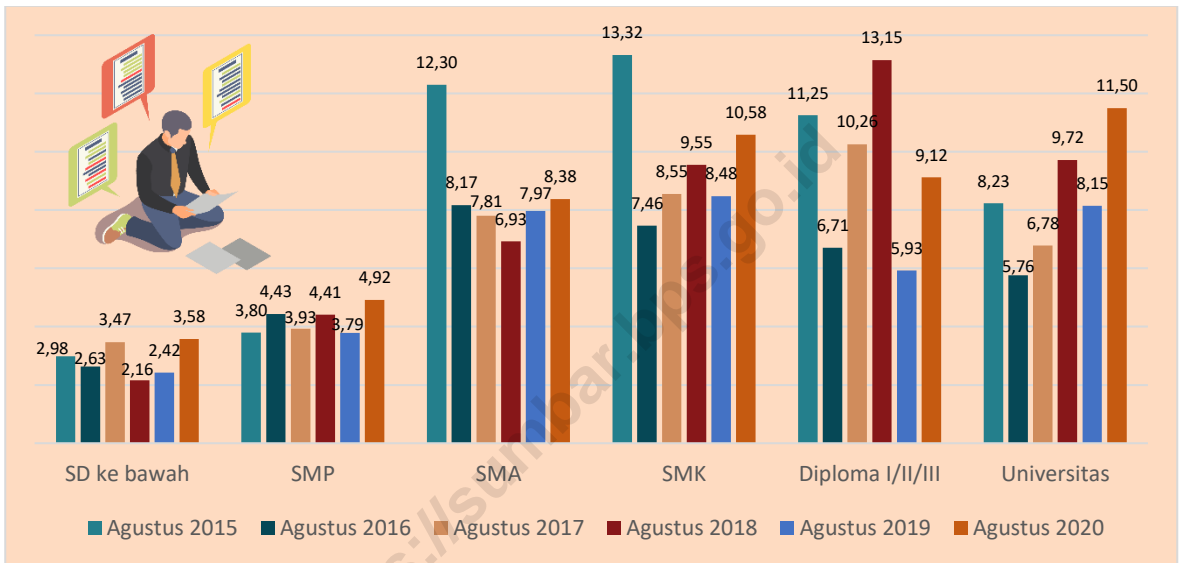
Catatan : Angka TPT 2018-2020 menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015

Sumber: Indikator Strategis Provinsi Sumatera Barat 2019 dan BRS Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat 2020, BPS

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, terlihat bahwa pengangguran di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2015-2020 didominasi oleh

pengangguran yang berpendidikan SMA ke atas (gambar 3.4). Tahun 2015 TPT tertinggi adalah SMA sebesar 10,32 persen tetapi tahun 2020 TPT tertinggi adalah lulusan universitas sebesar 11,50 persen.

Gambar 3.4.
TPT Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Barat, 2015-2020 (Agustus)



Catatan :Angka TPT 2018-2020 menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015

Sumber: Kumpulan BRS Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat Agustus 2015-2020, BPS

Pengangguran terdidik menjadi masalah tersendiri dan isu besar saat ini. Hal ini dikarenakan para pencari kerja yang terdidik biasanya lebih memilih-milih jenis pekerjaan sedangkan kebutuhan usaha sangat terbatas (*demand* dan *supply* tidak seimbang). Sehingga pencari kerja terdidik lebih lama mendapatkan pekerjaan.

Pakar hukum ketenagakerjaan Universitas Indonesia, Palawan Simanjuntak dalam Prakasa dan Andini (2020) menjelaskan alasan Indonesia punya banyak pengangguran terdidik. Sistem pendidikan di Indonesia masih minim membangun jiwa kreativitas dan inovasi. Padahal pengetahuan saja tidak cukup, harus diimbangi dengan keterampilan agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha maupun dunia industri. Kesiapan tenaga kerja, investasi dan pengembangan SDM, serta daya tarik tenaga kerja merupakan pekerjaan rumah baik pemerintah maupun individu, agar tenaga kerja mampu bersaing baik di dalam maupun luar negeri. Dari sisi pemerintah, Palawan mengingatkan pentingnya investasi bagi perkembangan dunia usaha. Selain

itu juga penting memasukkan bobot besar dalam aspek *entrepreneurship* pada pelatihan pra kerja.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota

Selama tahun 2015-2020 Kota Padang masih menduduki posisi tertinggi tingkat pengangguran terbukanya, walaupun trennya dari tahun ke tahun menurun. Sebaliknya terjadi untuk Kab. Kepulauan Mentawai yang memiliki TPT paling rendah pada tahun 2015 namun berangsur naik dari tahun ke tahun. TPT Kab. Kepulauan Mentawai mengalami kenaikan 2,73 poin dari tahun 2015 yaitu 1,25 persen menjadi 3,98 persen tahun 2020. Pada Tahun 2020, terdapat 7 kabupaten/kota yang TPT-nya berada diatas TPT Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kab. Padang Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang dan Kab. Pesisir Selatan.

Tabel 3.3.
TPT Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat,
2015-2020

Kabupaten/Kota (1)	2015 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019 (5)	2020 (6)
01. Kab. Kep. Mentawai	1,25	1,96	2,31	2,92	3,98
02. Kab. Pesisir Selatan	11,69	5,95	6,03	6,02	7,00
03. Kab. Solok	3,97	6,05	6,12	4,72	4,65
04. Kab. Sijunjung	4,26	3,32	3,22	3,64	5,30
05. Kab. Tanah Datar	4,46	3,72	4,01	3,20	4,79
06. Kab. Padang Pariaman	5,80	6,65	7,03	6,08	8,13
07. Kab. Agam	6,05	4,23	4,93	4,78	4,61
08. Kab. Lima Puluh Kota	3,78	2,60	2,73	2,30	3,03
09. Kab. Pasaman	5,06	6,81	6,04	5,28	5,04
10. Kab. Solok Selatan	6,30	5,54	5,84	4,91	5,62
11. Kab. Dharmasraya	3,51	3,69	4,02	5,06	5,31
12. Kab. Pasaman Barat	3,79	3,99	3,36	4,74	4,69
71. Kota Padang	14,00	9,44	9,29	8,74	13,64
72. Kota Solok	4,72	5,88	6,03	7,06	8,35
73. Kota Sawahlunto	7,18	6,19	5,92	6,84	8,20
74. Kota Padang Panjang	6,33	5,43	5,35	4,38	7,22
75. Kota Bukittinggi	6,04	6,94	7,24	6,20	7,51
76. Kota Payakumbuh	7,07	3,45	3,95	4,13	6,68
77. Kota Pariaman	6,61	5,97	5,82	5,48	5,73
Sumatera Barat	6,89	5,58	5,66	5,38	6,88

Catatan : Angka TPT 2016 untuk Kab/Kota tidak ada

Angka TPT 2018-2020 menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015

Sumber: Indikator Strategis Provinsi Sumatera Barat 2019 dan BRS Ketenagakerjaan Agustus 2020, BPS

3.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator tolok ukur keberhasilan pembangunan dari sisi kualitas hidup penduduknya. Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu:

1. Kelompok "Sangat Tinggi": $IPM \geq 80$
2. Kelompok "Tinggi": $70 \leq IPM \leq 80$
3. Kelompok "Sedang": $60 \leq IPM \leq 70$
4. Kelompok "Rendah": $IPM < 60$

Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

IPM Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2015-2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, IPM Sumatera Barat 69,98 masuk kategori sedang. Seiring dengan pertambahan tahun, IPM Sumatera Barat naik menjadi 71,92 pada tahun 2019 dimana capaian pembangunan manusia Sumatera Barat termasuk tinggi. Peningkatan IPM ini dikarenakan semua komponen pembentuk IPM Sumatera Barat juga mengalami peningkatan selama tahun 2015-2019. Selain itu jika dibandingkan dengan IPM Nasional, IPM Sumatera Barat selalu diatas IPM Nasional (Tabel 3.4).

Ada 3 dimensi pembentuk IPM yaitu umur panjang dan sehat (umur harapan hidup), pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah) dan Standar Hidup Layak (pengeluaran per kapita). Dalam RPJMD Sumatera Barat disebutkan bahwa rata-rata lama sekolah menjadi perhatian pemerintah Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 RLS Sumatera Barat masih rendah yaitu 8,42. Selang empat tahun setelahnya rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan menjadi 8,92. Yang berarti rata-rata penduduk Sumatera Barat masih berada di pendidikan formal paling tinggi sampai SMP. Namun begitu, pencapaian pendidikan Sumatera Barat ini sudah melampaui proyeksi RLS yang sudah ditargetkan dalam RPJMD Sumatera Barat. Begitu juga halnya dengan semua komponen IPM Sumatera Barat juga melampaui target RPJMD Sumatera Barat.

Tabel 3.4.
IPM Menurut Komponen Pembentuknya Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia, 2015-2019

Komponen	2015		2016		2017		2018		2019	
	Sumatera Barat	Indonesia	Sumatera Barat	Indonesia	Sumatera Barat	Indonesia	Sumatera Barat	Indonesia	Sumatera Barat	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Umur Harapan Hidup (UHH)	68,66	70,78	68,73	70,90	68,78	71,06	69,01	71,20	69,31	71,34
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,60	12,55	13,79	12,72	13,94	12,85	13,95	12,91	14,01	12,95
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS 25 th+)	8,42	7,84	8,59	7,95	8,72	8,10	8,76	8,17	8,92	8,34
Pengeluaran Perkapita di Sesuaikan (ribu Rp)	9 804	10 150	10 126	10 420	10 306	10 664	10 638	11 059	10 925	11 299
IPM	69,98	69,55	70,73	70,18	71,24	70,81	71,73	71,39	72,39	71,92

Sumber: Indikator Strategis Provinsi Sumatera Barat 2019, BPS

Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera

Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat cenderung positif selama tahun 2015-2019 (Tabel 3.5). Selama periode tersebut Kota Padang selalu memiliki IPM tertinggi dan Kab. Kepulauan Mentawai memiliki IPM Terendah. Pada tahun 2019, IPM Kota Padang mencapai 82,68 sehingga capaian pembangunan manusia di Kota Padang termasuk sangat tinggi sedangkan IPM Kab. Kepulauan Mentawai 61,26 masih termasuk kategori sedang. Walaupun memiliki IPM terendah, namun pertumbuhan Kab. Kepulauan Mentawai tahun 2019 tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lain.

Level pencapaian pembangunan manusia Sumatera Barat yang tinggi pada tahun 2019 tidak menjamin bahwa pembangunan terjadi secara merata. Perbedaan capaian IPM antara daerah IPM tertinggi dan terendah selama tahun 2015 sampai 2019 berkisar 22 poin. Meskipun demikian, selama tahun 2015-2019 perbedaan IPM kedua daerah ini semakin kecil yaitu 22,95 poin pada tahun 2015 menjadi 21,42 pada

tahun 2019. Pemerintah tentunya mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah agar disparitas antar wilayah ini semakin mengecil dan diupayakan untuk hilang.

Tabel 3.5.
IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2015-2019

Kabupaten/Kota	IPM					Pertumbuhan (%)			
	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01. Kep. Mentawai	57,41	58,27	59,25	60,28	61,26	1,48	1,65	1,71	1,60
02. Pesisir Selatan	68,07	68,39	68,74	69,40	70,08	0,47	0,51	0,95	0,97
03. Kab. Solok	67,12	67,67	67,86	68,60	69,08	0,81	0,28	1,08	0,69
04. Sijunjung	65,30	66,01	66,60	66,97	67,66	1,08	0,89	0,55	1,02
05. Tanah Datar	69,49	70,11	70,37	71,25	72,14	0,88	0,37	1,24	1,23
06. Padang Pariaman	68,04	68,44	68,90	69,71	70,59	0,58	0,67	1,16	1,25
07. Agam	69,84	70,36	71,10	71,70	72,37	0,74	1,04	0,84	0,93
08. Lima Puluh Kota	67,65	68,37	68,69	69,17	69,67	1,05	0,47	0,69	0,72
09. Pasaman	64,01	64,57	64,94	65,60	66,46	0,87	0,57	1,01	1,29
10. Solok Selatan	67,09	67,47	67,81	68,45	68,94	0,56	0,50	0,93	0,71
11. Dharmasraya	69,84	70,25	70,40	70,86	71,52	0,58	0,21	0,65	0,92
12. Pasaman Barat	65,26	66,03	66,83	67,43	68,21	1,17	1,20	0,89	1,14
71. Padang	80,36	81,06	81,58	82,25	82,68	0,86	0,64	0,81	0,52
72. Kota Solok	76,83	77,07	77,44	77,89	78,38	0,31	0,48	0,58	0,63
73. Sawahlunto	69,87	70,67	71,13	71,72	72,39	1,13	0,65	0,82	0,93
74. Padang Panjang	75,98	76,50	77,01	77,30	78,00	0,68	0,66	0,38	0,90
75. Bukittinggi	78,72	79,11	79,80	80,11	80,71	0,49	0,86	0,39	0,74
76. Payakumbuh	77,42	77,56	77,91	78,23	78,95	0,18	0,45	0,41	0,91
77. Pariaman	74,98	75,44	75,71	76,26	76,70	0,61	0,36	0,72	0,57
Sumatera Barat	69,98	70,73	71,24	71,73	72,39	1,06	0,72	0,68	0,91

Sumber: Sumatera Barat dalam Angka 2020, BPS

3.4 Nilai Tukar Petani (NTP)

Perekonomian Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Sumatera Barat tahun 2015-2019 yang selalu menjadi paling besar. Oleh karena itu sektor pertanian menjadi salah satu yang menjadi fokus pembangunan Sumatera Barat. Selain itu kesejahteraan petani juga menjadi perhatian.

Pengukuran tingkat kesejahteraan petani dapat menggunakan indikator Nilai Tukar Petani (NTP). NTP adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) dalam persentase. Petani selain sebagai produsen yang memproduksi hasil pertanian, juga merupakan konsumen yang membeli barang dan jasa untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Dengan kata lain, nilai NTP menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan biaya produksi dan barang/jasa yang dikonsumsi. Semakin tinggi NTP relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Gambar 3.5.
Perkembangan NTP Tahunan Sumatera Barat dan Nasional, 2015-2019



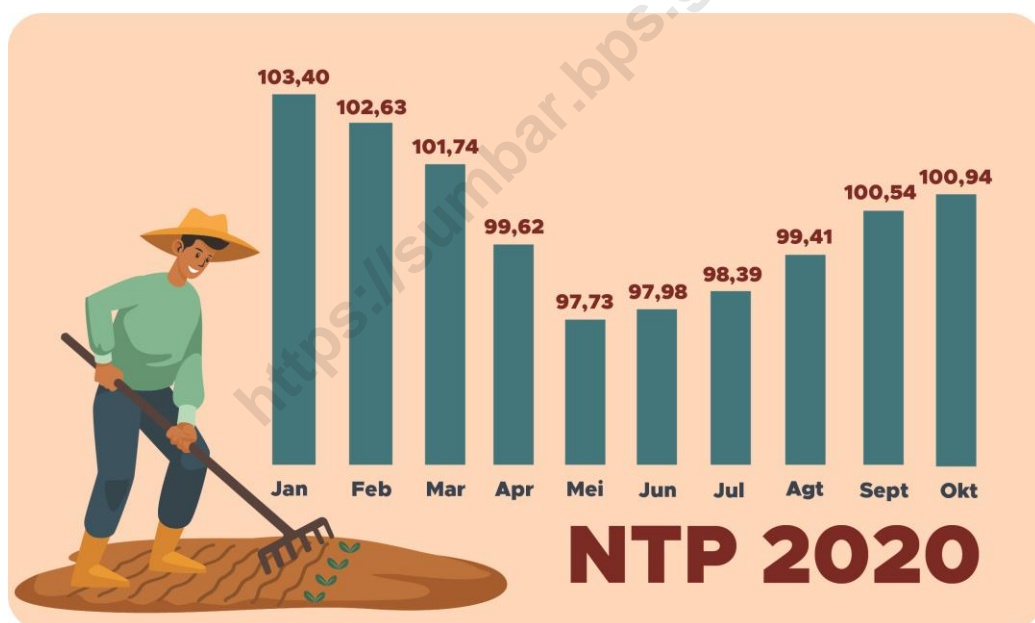
Sumber: Indikator Strategis Provinsi Sumatera Barat 2019, BPS

Pada gambar 3.5 terlihat bahwa NTP Sumatera Barat dari tahun 2015-2019 selalu dibawah angka nasional dan belum mencapai diatas 100. NTP yang kurang dari

100 menunjukkan bahwa NTP tahun bersangkutan kurang baik dibandingkan dengan NTP pada tahun dasar sehingga petani mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsi.

Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2015 (sebesar 97,74 persen) terus mengalami penurunan sampai tahun 2018 menjadi 95,31 persen, kemudian mengalami kenaikan sebesar 0,71 persen menjadi 95,99 persen pada tahun 2019. Hal ini berarti tingkat kemampuan daya beli dan daya tukar petani di pedesaan meningkat dibandingkan tahun 2018.

Gambar 3.6.
Perkembangan NTP Bulanan Sumatera Barat, 2020



Sumber: Kumpulan BRS Perkembangan NTP Provinsi Sumatera Barat 2020, BPS

Jika dilihat perkembangan NTP Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 (gambar 3.6), NTP bulan Januari 2020 mencapai 103,40 yang berarti petani mengalami surplus atau harga produksinya naik lebih besar daripada kenaikan harga barang/jasa konsumsi. Namun keadaan ini semakin menurun sampai pada bulan Mei 2020 dimana NTP mencapai 97,73 persen. Kemudian mulai bulan Juni 2020 terjadi peningkatan NTP. Hal ini berlanjut terus sampai bulan Oktober 2020, dimana NTP kembali mencapai di atas 100 yaitu 100,94.

4 PERKEMBANGAN PARIWISATA DAN INDEKS PEMBANGUNAN DESA (IPD) PROVINSI SUMATERA BARAT 2015-2020



Jumlah Wisatawan Mancanegara
yang Datang ke Sumatera Barat Tahun 2019

61.131
orang



Meningkat **25,28%**
dibandingkan tahun 2015

Jumlah wisatawan negara merupakan data wisatawan yang masuk melalui pintu imigrasi Bandara Internasional Minangkabau (BIM)

TPK Tingkat Penghunian Kamar

55,10 <<

Tingkat Penghunian Kamar
Hotel Bintang Tahun 2019

24,75 <<

Tingkat Penghunian Kamar
Hotel Non Bintang Tahun 2019



Jumlah Desa/Nagari di Sumatera Barat Menurut Kategori IPD

» Perkembangan jumlah desa menurut status IPD **866 desa yang sama** yang telah ada sejak tahun 2014



Mandiri
Meningkat
112,94%
dibandingkan
tahun 2014



Berkembang
Menurun
9,12%
dibandingkan
tahun 2014



Tertinggal
Menurun
50,00%
dibandingkan
tahun 2014

» Berdasarkan Hasil Podes Tahun 2018, jumlah desa/kelurahan/nagari di Sumatera Barat sebanyak

1.275

yang terdiri dari **1.045 desa/nagari dan 230 kelurahan**. Terjadi penambahan 159 desa/nagari dibandingkan tahun 2014 (**866 desa/nagari**).



4. PERKEMBANGAN INDIKATOR PARIWISATA DAN INDEKS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, 2015-2020

4.1 Pariwisata

Sumatera Barat terkenal dengan beragam objek wisata, diantaranya ada objek wisata pantai, gunung, danau, ngarai dan wisata sejarah. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadikan pembangunan sektor pariwisata salah satu prioritas pembangunan. Pemerintah menargetkan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya, dengan sasaran meningkatkan kunjungan wisatawan.

Tabel 4.1.

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Provinsi Sumatera Barat, 2015-2020

Bulan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jan	3 289	3 378	4 020	3 253	4 528	4 341
Feb	3 373	3 892	4 045	4 459	5 144	4 038
Mar	4 144	4 428	4 989	5 057	6 196	2 495
Apr	3 492	4 063	4 558	4 293	5 434	0
Mei	4 598	4 854	4 109	3 002	3 576	0
Jun	3 730	2 104	2 940	4 549	5 212	0
Jul	3 569	4 094	4 080	5 100	5 183	0
Agt	4 199	4 224	5 209	5 602	5 967	0
Sep	4 292	3 329	4 347	5 094	4 427	1
Okt	3 956	4 980	4 826	4 055	5 271	
Nov	4 811	5 115	4 622	5 118	5 013	
Des	5 302	5 225	8 568	4 801	5 180	
Jumlah	48 755	49 686	56 313	54 383	61 131	10 875

Sumber: Kumpulan BRS Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Sumatera Barat 2015-2020, BPS

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa perkembangan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) ke Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2015-2019 trennya mengalami kenaikan kecuali tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Jumlah wisatawan mancanegara ini merupakan data wisatawan yang masuk

melalui pintu imigrasi di Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Jumlah wismandari tahun 2015-2019 naik sebesar 25,28 persen, yaitu dari 48.755 orang (2015) menjadi 61.131 orang (2019). Jika dilihat perkembangan tiap bulannya, jumlah kunjungan wisman selama periode 2015-2019 berfluktuasi. Jumlah kunjungan wisman Januari-September 2020 turun 76,19 persen dibandingkan Januari-September 2019. Hal ini dikarenakan pembatasan mobilisasi penduduk dan penerbangan yang masuk ke Sumatera Barat diakibatkan pandemi COVID-19. Sehingga pada April-Agustus 2020 tidak ada kunjungan wisman dan pada Bulan September hanya 1 kunjungan wisman.

Gambar 4.1.
 TPK Hotel Bintang dan Hotel Non Bintang
 di Provinsi Sumatera Barat, 2015-2019



Sumber: Indikator Strategis Provinsi Sumatera Barat 2019, BPS

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kinerja usaha penyedia akomodasi/hotel pada periode tertentu adalah Tingkat Penghunian Kamar (TPK). TPK adalah perbandingan antara banyaknya kamar yang terpakai dengan banyaknya kamar yang tersedia (dalam persen), yang menunjukkan apakah suatu akomodasi diminati oleh pengunjung atau tidak. Jika dilihat berdasarkan klasifikasi hotelnya selama tahun 2015-2019 maka TPK hotel bintang lebih tinggi dibandingkan TPK hotel non bintang (gambar 4.1). Hal ini menunjukkan wisatawan

yang datang ke Sumatera Barat lebih memilih tinggal di hotel bintang daripada non bintang.

Perkembangan TPK hotel bintang di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan kecuali TPK tahun 2019 (55,10 persen) mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 (56,18 persen). Pada tahun 2015 TPK hotel bintang dibawah 50 persen (49,85 persen) tetapi tahun 2016-2019 TPK hotel bintang selalu diatas 50 persen. TPK Hotel bintang tahun 2019 mencapai 55,10 persen. Ini berarti rata-rata lebih dari setengah jumlah kamar yang tersedia dipakai setiap malam pada seluruh hotel bintang di Sumatera Barat selama 2016-2019. Hal ini juga menunjukkan akomodasi yang tersedia di Sumatera Barat cukup diminati oleh wisatawan.

Sebaliknya, perkembangan TPK hotel non bintang yang terus menurun. TPK hotel non bintang pada tahun 2015 mencapai 34,07 persen mengalami penurunan 9,32 poin menjadi 24,75 persen dibandingkan tahun 2019.

4.2 Indeks Pembangunan Daerah (IPD)

Salah satu indikator yang menunjukkan pencapaian kinerja pembangunan adalah Indeks Pembangunan Desa (IPD). IPD merupakan indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa pada suatu waktu. IPD terdiri dari 42 indikator yang digolongkan dalam 5 dimensi yaitu ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintah. Kelima dimensi ini nantinya menjadi dasar dalam mengklasifikasikan desa menjadi 3 status yaitu Desa Tertinggal, Desa Berkembang dan Desa Mandiri. Semakin tinggi IPD menunjukkan semakin mandiri desa tersebut.

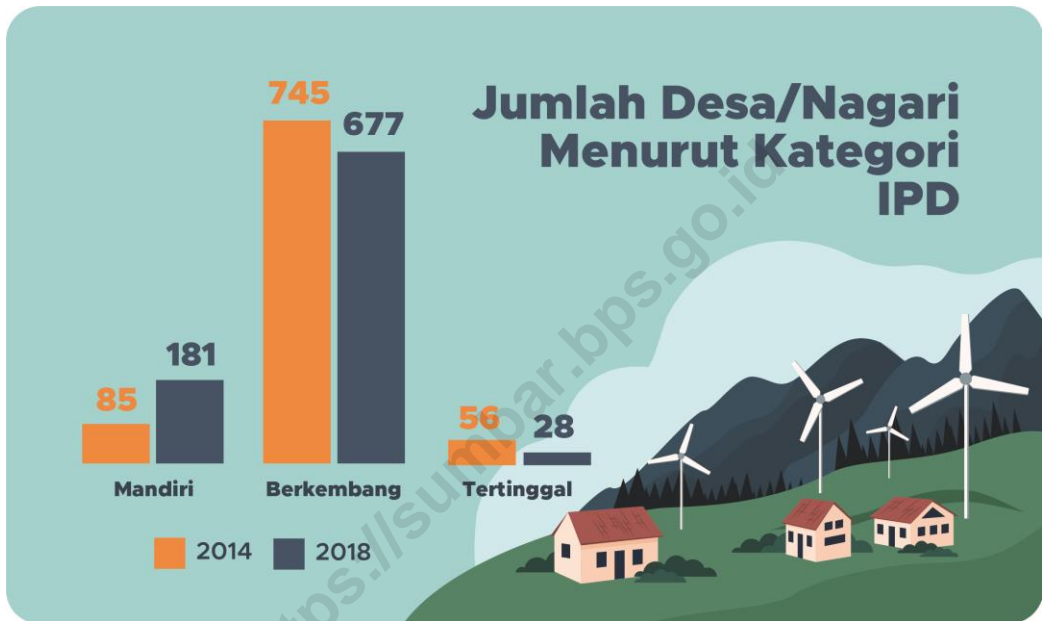
IPD dibentuk berdasarkan data hasil dari survei Potensi Desa (Podes) yang dilakukan Badan Pusat Statistik. Podes sendiri merupakan kegiatan sensus terhadap seluruh wilayah administrasi terendah setingkat desa/kelurahan/nagari, termasuk pendataan di kecamatan dan kabupaten/kota. Dari data podes ini dapat dilihat keadaan dan potensi suatu desa.

Berdasarkan hasil Podes Sumatera Barat tahun 2018, jumlah desa/kelurahan/nagari di Sumatera Barat sebanyak 1.275 yang terdiri dari 1.045 desa/nagari dan 230 kelurahan. Terjadi penambahan desa/nagari sebanyak 159 desa/nagari dibandingkan tahun 2014 (886 desa/nagari). Desa/Nagari/Kelurahan yang termasuk dalam penghitungan IPD adalah hanya yang berstatus desa dan nagari. Menurut status IPD, sebagian besar desa di Sumatera Barat pada 2018 merupakan desa berkembang, yaitu mencapai 76,94 persen dan desa mandiri sebanyak 20,10 persen. Hal ini menjadikan Provinsi Sumatera Barat sebagai provinsi keempat dengan persentase jumlah desa mandiri tertinggi di Indonesia.

Gambar4.2 memperlihatkan perkembangan jumlah desa menurut status IPD di 866 desa yang sama, yang telah ada sejak tahun 2014. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, pada tahun 2018 lebih dari separuh desa tertinggal sudah tidak berstatus desa tertinggal lagi yaitu 56 desa/nagari menjadi hanya 28 desa/nagari. Begitu juga dengan desa berkembang penurunannya mendekati 10 persen. Sebaliknya penambahan desa mandiri lebih dua kali lipat, mencapai 112,94 persen. Hal ini menunjukkan bahwa program pembangunan desa yang dilakukan pemerintah baik pemerintah pusat

sampai pemerintah desa telah berhasil meningkatkan status suatu desa yang dulunya desa tertinggal menjadi desa berkembang atau mandiri.

Gambar 4.2.
Jumlah Desa/Nagari Menurut Kategori IPD
Provinsi Sumatera Barat, 2014-2018



Sumber: Indikator Strategis Provinsi Sumatera Barat 2019, BPS

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2013. Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Jakarta: CV. Dharmaputra
- _____. 2015. Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Tahun 2010-2020 Provinsi Sumatera Barat. Jakarta: BPS
- _____. 2019. Indeks Pembangunan Manusia 2018. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. 2017. Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat 2016. Padang: CV. Sarana Multi Abadi
- _____. 2019. Indikator Strategis Provinsi Sumatera Barat 2019. Padang: CV. Graphic Dwipa
- _____. 2020. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat 2019. Padang: CV. Graphic Dwipa
- _____. 2020. Indikator Strategis Provinsi Sumatera Barat 2019. Padang: CV. Graphic Dwipa
- _____. 2020. Sumatera Barat dalam Angka 2020. Jakarta: CV. Petratama Persada
- Irawan, Puguh Brodo dkk. 2016. Official Statistics Sosial-Kependudukan Dasar. Bogor: In Media
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 2018. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Sekretaris Daerah. Padang
- Prakasa, K. dan Andini, A. Dilema paara Pengangguran Terdidik. <https://lokadata.id/artikel/dilema-para-pengangguran-terdidik>. Diakses 3 Agustus 2020.
- Syafitri, A. dan Ariusni. 2019. "Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat" dalam Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan Volume 1 Nomor 2 Mei 2019 (hlm. 351-364).
- Todaro, M. P dan Smith, S.C. 2003. Economic Development, Eight Edition. England: Pearson Education Limited

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://sumbar.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 48 Padang 25135
Telp.: 0751-442158/442159
Homepage: <http://sumbar.bps.go.id>
E-mail: bps1300@bps.go.id

ISBN 978-602-6544-75-9



9 786026 544759